## **BAB VI**

## **PENUTUP**

## 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Hakekat akuntabilitas ialah pertanggungjawaban maka dengan ini hasil analisis akuntabilitas Dana Pemberdayaan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kupang sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis (Dokumen Perkuatan Modal Kerja) yang berarti dengan mengacu pada Teori Stewardship dan Akuntabilitas serta Pengelolaan, Disperindagkop telah bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab dan berintegritas, mengelola dana publik demi kepentingan masyarakat. Akuntabilitas diwujudkan melalui transparansi, pelaporan, evaluasi, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan, guna membangun kepercayaan publik dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat lokal. mulai dari penetapan tujuan yang ingin dicapai, sasaran, prosedur pengajuan bantuan modal, besaran pinjaman, kriteria/persyaratan calon penerima dana pemberdayaan, ketentuan penerima dana pemberdayaan,pembinaan, pengawasan dan pelaporan, serta sanksi.
  - Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masalah yang ditemukan masih bersangkutan dengan kemacetan dalam pengembalian dana pemberdayaan.
- Pada faktor-faktor yang menyebabkan tidak tertagihnya dana pemberdayaan ialah merupakan faktor ekternal yaitu faktor dari masyarakat itu sendiri

dikarenakan usaha gagal (gagal panen, bencana banjir, hama), meninggal dunia dan juga faktor tak terduga berupa musiba covid-19 dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

## 6.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran bahwa pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kupang terus mempertahankan kepercayaan negara dan masyarakat dalam pengelolaan dana pemberdayaan yang akuntabel dan transparanasi. Untuk masalah kemacetan proses pengembalian dana pemberdayaan ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kupang di harapkan secepatnya menyelesaikan permasalahan tertunggaknya dana pemberdayaan agar kedepannya dana ini akan terus digulirkan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk memfasilitas masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelolah sumberdaya yang dimiliki agar pada akhirnya masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan.